

## **URGENSITAS PARADIGMA DOSEN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMPERTEGAS NASIONALISME**

(Diterima 08 Oktober 2018; direvisi 30 Oktober 2018; disetujui Desember 2018)

**Ahmad Fadli & Mahendra Aswit Sandra Barata<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Dosen FIP IKIP PGRI Jember

email : fadlimangli@gmail.com

### **ABSTRAK**

Subtansi penelitian ini mencoba menelusuri paradigma dosen Pendidikan Kewarganegaraan kaitannya dengan bangunan nasionalisme. Fakta empirisnya, nasionalisme dewasa ini dihadapkan pada berbagai macam problematika tantangan. Tantangan dalam wujud ancaman terhadap nasionalisme berasal dari dalam maupun luar negeri. Fokus penelitian ini menitikberatkan pada paradigma dosen Universitas Jember (UNEJ) dan IKIP PGRI Jember dalam mempertegas nasionalisme. Pilihan terhadap para dosen UNEJ karena secara institusional, UNEJ merupakan kampus negeri terbesar di daerah Tapalkuda Jawa Timur, sementara pilihan terhadap IKIP PGRI Jember sebagai penyeimbang dari unsur kampus swastanya. Adapun metode yang telah digunakan adalah kualitatif dengan sifat deskriptif serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kajian paradigmatis. Pendekatan kajian paradigmatis digunakan untuk mengetahui secara mendalam mengenai cara pandang dosen Pendidikan Kewarganegaraan di kampus UNEJ dan IKIP PGRI Jember dalam mempertegas nasionalisme tersebut. Sementara penggunaan metode kualitatif dengan sifat deskriptif di sini, dimaksudkan dalam pelaporan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat membuat gambaran secara sistematis dan akuratif akan fakta-fakta lapangan yang valid. Fakta-fakta di lapangan tersebut kami rangkum untuk menformat ulang sistem pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Penelitian ini telah *men-scanning* kondisi riil nasionalisme dosen pendidikan kewarganegaraan beserta problematika bawaannya. Hasil penelusuran ini diharapkan dapat menjadi miniatur gambaran realitas nasionalisme sebenarnya. Sehingga gerakan mempertegas nasionalisme tidak berangkat dari wacana utopis atau hanya sekedar romantisme historis belaka. Sehingga tawaran akademis melalui kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan perguruan tinggi benar-benar berangkat dari kebutuhan yang ada berdasar perkembangan fenomena kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga telah mencarikan formulasi pendidikan kewarganegaraan yang tepat dalam mempertegas nasionalisme.

**Kata Kunci:** *Nasionalisme, Tantangan, Paradigma*

## **ABSTRACT**

The substance of this study tries to trace the paradigm of the Citizenship's lecturers. Education is related with nasionalism's building. The empirical facts, nationalism today is faced with various kinds of problematic challenges. Some challenges in the form of threats to nationalism come from within and outside the country. The focus of this research is lecturer's paradigm at the University of Jember (UNEJ) and IKIP PGRI Jember in reinforcing nationalism. The choice of the UNEJ lecturers because UNEJ is the largest state campus in Tapalkuda East Java institutionally, while the choice of IKIP PGRI Jember is as a counterweight to the private campus. The method that has been used is qualitative with descriptive nature and the approach is used by a paradigmatic study approach. The paradigmatic study approach was used to find out in depth the perspective of the Citizenship Education lecturers at the UNEJ campus and IKIP PGRI Jember in reinforcing the nationalism. While the use of qualitative methods with descriptive nature here, it is intended in reporting the results of research conducted by researchers can make a systematic and accurate description of the facts on the field that is valid. We summarize the facts in the field to reformat the citizenship education learning system.

This research has been scanning the real nationalism condition of the lecturers of citizenship education and their inherent problems. The results of this search are expected to be a miniature picture of the reality of true nationalism. So that the movement to reinforce nationalism does not depart from utopian discourse or merely historical romance. So that the academic offer through the Higher Education Citizenship curriculum really departs from the existing needs based on the development of contemporary phenomena. In addition, this research has also found the right formulation of citizenship education in affirming nationalism.

**Keywords:** *Nationalism, Challenges, Paradigms*

## PENDAHULUAN

Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam kontekstualisasi ke-Indonesia-an dewasa ini. Signifikansi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia khususnya dalam ruang lingkup akademis, lebih diorientasikan sebagai kerangka konseptual dan paradigmatik untuk mencapai tujuan akhir atau capaian pembelajaran (*learning outcome*) dengan terwujudnya kebijakan/keadaban kewarganegaraan (*civic virtues/civility*) dalam diri setiap warga Negara Indonesia. Menurut Udin S. Winata Putra (2014: iv) kebijakan/keadaban kewarganegaraan (*civic virtues/civility*) tersebut, perlu ditopang dengan pengembangan elemen-elemennya, yakni wawasan/pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), komitmen kewarganegaraan (*civic comittment*), kepercayaan diri kewarganegaraan (*civic confidence*), dan kecakapan kewarganegaraan (*civic competence*).

Fakta kekiniannya, bangsa Indonesia dihadapkan pada beberapa problematika pergeseran konseptual

paradigmatik dan penyimpangan tindakan warga negara Indonesia dalam bangunan relasi kehidupan sosial kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Sebagaimana penuturan D. Budimansyah (2009: 12) bahwa polarisasi konseptual paradigmatik dan aplikasi tindakan masyarakat Indonesia saat ini, banyak dipengaruhi oleh budaya yang tata nilainya tidak pernah dilahirkan dari rahim budaya Nusantara, akan tetapi lebih banyak mengadopsi tata nilai baru dan asing. Padahal tata nilai yang baru dan mengadopsi dari produk asing, belum tentu tepat dan bersesuaian dengan *local wisdom* ke-Indonesiaan. Belum lagi berita *hoax* yang juga berpretensi untuk mencipta disharmonitas sosial dan mendekonstruksi integrasi bangsa Indonesia (Kompas, 9/1/2017).

Tata nilai yang telah lama dipegangi dan dijalankan sebagai suatu kebenaran dalam bangunan relasi sosial, pendidikan, ekonomi, politik, budaya, dan adat istiadat di Indonesia, kini telah banyak mengalami degradasi atau bahkan hilang sama sekali. Bangunan konsep tata nilai kewarganegaraan yang mengedepankan kearifan lokal (*local wisdom*), kini banyak yang memandang

sebagai fosil yang harus dimuseumkan. Keberadaan tata nilai budaya kewarganegaraan sudah tidak dianggap lagi, atau kalau memang dipaksakan akan melahirkan anggapan-anggapan aneh seakan tidak memiliki relevansi terhadap problematika kontemporer. Padahal tata nilai budaya kewarganegaraan jika dibingkai dalam Pendidikan Kewarganegaraan secara tepat, maka dapat dijadikan sebagai kawah candra dimuka dalam mengurai problematika kekinian masyarakat Indonesia.

Tata nilai yang berangkat dari kearifan lokal (*local wisdom*), seharusnya dijunjung tinggi karena memang telah teruji dan terbukti akan efektivitas dan kesantunannya (T. Abdullah, 2001: 79). Efektivitas dan kesantunan kearifan lokal (*local wisdom*), kini telah tergantikan oleh ideologi baru yang belum tentu bersesuaian dengan jiwa dan karakter ke-Indonesiaan yang plural, di mana pluralitas di Indonesia sangatlah kompleks dengan keunikannya tersendiri. Beberapa pandangan miring dan berimplikasi pada penyimpangan terhadap tata nilai yang bersumber warisan produk budaya Nusantara tersebut, harus segera mendapatkan

jawaban *solutif*-nya; salah satunya melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan harus benar-benar hadir dan mampu mempengaruhi struktur sosial masyarakat untuk mengurai problematika kewarganegaraan di Indonesia saat ini.

Ketelitian dan kecermatan perangkat analisis dalam men-*scanning* realitas dinamika kekinian, maka pastinya akan melahirkan keprihatinan secara mendalam. Keprihatinan-keprihatinan tersebut karena dengan mudahnya mendapati kenyataan bahwa sesuatu yang tadinya dianggap tabu atau hal yang dianggap nista oleh masyarakat, kini justeru terjadi dan dilakukan secara terang-terangan. Permisalan yang sangat mudah dijumpai dan mampu membuat seseorang mengernyitkan dahi jikalau mau memikirkannya, seperti; tontonan tarian *erotisme* yang tadinya diisolir dalam ruang diskotik, kini justeru hadir sampai masuk ke ruang kamar tidur melalui media TV atau internet. Selain itu, terdapat polarisasi tindakan masyarakat yang mengadopsi sikap materialistik dan hedonistik. Sikap materialistik dan hedonistik telah menggejala di mana-mana dengan cara

pandang, cara menilai, dan menyikapi segala sesuatunya berdasar kepentingan dan kesenangan sesaat belaka. Konsekuensi sikap masyarakat yang materialis dan hedonis ini, pada akhirnya justeru akan melahirkan problem masyarakat yang sangat kompleks. Kompleksitas problem jika tidak terurai dan dibiarkan secara berlarut-larut, maka akan berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari.

Dewasa ini kita dengan mudah mendapati kerusakan dalam bangunan kehidupan kewarganegaraan, misalnya; aksi terorisme, premanisme, korupsi, pemerkosaan terhadap anak dan bentuk penyimpangan sosial lainnya. Kepekaan dan kesalehan sosial warga negara Indonesia, kenyatannya kini mulai meluntur. Melunturnya hal ini sebagai penanda telah tercerabutnya akar budaya bangsa Indonesia. Dunia kampus yang diharapkan sebagai penopang pembangunan sumberdaya manusia yang moralis, intelektualis, rasionalis, dan ilmiah, justeru menjadi lumbung gerakan-gerakan radikal. Pada sisi yang lain, para pejabat publik pun pada akhirnya kehilangan rasa tanggung jawab dengan kesewenang-wenangan dalam mengambil

kebijakan yang berdasarkan kepentingan politis belaka. Para pejabat publik saat ini dalam mengambil kebijakan tidak didasarkan pada rasa tanggung jawab yang harus diembannya. Fenomena koruptif akhirnya dianggap sebagai suatu hal yang biasa pula dan harus melahirkan permakluman bersama (Kemendikbud Dikti, 2011: 3-20).

Fenomena kehidupan semacam ini, jika dibiarkan hanya akan melahirkan sikap individualistik masyarakat Indonesia, seterusnya akan memunculkan sikap intoleransi dan dehumanisasi. Nilai kegotongroyongan yang dulu pernah kita bangga-banggakan sebagai *ikonik* kearifan lokal yang tidak dimiliki bangsa lain, kini telah jarang dan sulit mendapatinya lagi (Adzkiyak, 2015: 23). Tradisi bongkar rumah yang dibantu para tetangga dan masyarakat lingkungan secara suka rela, kini sudah berubah dengan cara harus diupah secara material. Kala musim panen raya tiba, para petani bekerjasama saling bergotong-royong (petani Jawa; *irutan*), saat ini pun telah menjadi kenangan indah belaka. Saat ada hajatan pernikahan atau khitanan yang dulu masyarakat saling bantu membantu menebang pohon untuk kayu bakar dan

mengadakan arisan sebagai kerukunan bertetangga, kini ruhnya juga telah hilang. Kala ada tetangga meninggal, semua warga lingkungan turut menangani *kifayah* dari memandikan sampai menguburkan untuk orang Islam, kini juga harus dengan cara dibayar. Banyak hal sebagai penanda kearifan lokal kita yang telah disepelekan atau bahkan ditinggalkan begitu saja.

Nilai kegotongroyongan yang menurut Ir. Sukarno sebagai intisari dari Pancasila, kini telah dinegasikan nilai-nilainya. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia yang menurut Proklamator Indonesia tersebut dapat disarikan menjadi trisila, dan trisila sendiri dapat disarikan menjadi ekasila yakni Gotong Royong (Kaelan: 2014, 14-15). Akan tetapi, makna ekasila dengan bentuk kegotongroyongan yang merupakan *ruh*-nya Bangsa Indonesia, saat ini terasa sudah tidak kerasan lagi berada dalam tubuh bangsa ini. Potensi deunifikasi bangsa Indonesia kini terbuka lebar, terbukti terdapat beberapa daerah yang menginginkan lepas dari Indonesia, *social class* hampir selalu menghiasi wajah media cetak dan elektronik setiap hari, kemiskinan, dan ketimpangan-

ketimpangan sosial juga masih banyak terjadi.

Berangkat dari pembacaan realitas tersebut, maka generasi Indonesia kiranya harus tampil kritis dalam menyikapi dinamika kekinian yang ada. Jangan sampai mereka di-*ninabobok*-kan oleh kesadaran semu dengan memberi permakluman sebagai bentuk sikap permisif atas penyimpangan sosial yang terjadi. Para generasi penerus bangsa harus menggunakan nalar kritisnya untuk tampil sebagai penjaga pagar batas antara kebenaran dan penyimpangan. Penyimpangan sosial harus tetap dikatakan dan disikapi sebagai kesalahan yang tidak untuk dileburkan dengan kebenaran. Bangunan idealitas yang demikian, kiranya dapat disokong melalui jalur pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan.

Secara substantif, Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi untuk mencipta generasi yang sadar akan status kewarganegaraannya beserta konsekuensi yang harus diembannya. Implikasi kesadaran akan status kewarganegaraan ini pada akhirnya menjadi sangat luas. Status sebagai warga negara Indonesia merupakan anugerah yang patut

disyukuri. Wujud syukur sebagai warga negara Indonesia, maka harus melahirkan rasa bangga diri beserta rasa memiliki dengan kecintaan berkebangsaan Indonesia (L.Anggraini: 2010, 61). Hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri harus dicarikan solusi dan disikapi secara tegas dengan penuh tanggung jawab. Khususnya ketika ada yang mencoba untuk Pancasila, UUD 1945, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Fenomena organisasi keagamaan transnasional yang mencoba mengganti NKRI dengan sistem khilafah, juga merupakan ancaman serius terhadap eksistensi NKRI. Maraknya kembali isu gerakan PKI yang dalam catatan sejarah pernah mencoba untuk mengukudeta bangsa Indonesia dan ditambah adanya beberapa organisasi atau aliran yang mengedepankan radikalisme (B. Anderson: 1999, 27) begitu marak dalam beberapa dedake terakhir. Fenomena ini kiranya perlu mendapatkan jawaban secara serius. Pendidikan Kewarganegaraan ke depan harus mampu membangun kerangka konseptual akademis dalam merajut tatanan nilai sosial kehidupan kemasyarakatan yang

berangkat dari kearifan lokal (*local wisdom*). Kearifan lokal (*local wisdom*) yang saat ini telah tercerabut dari akar budaya bangsa Indonesia, harus dikembalikan lagi sebagai tatanan nilai yang harus dijunjung tinggi untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Membangun generasi bangsa yang sadar akan nilai kemanusiaan, kegotongroyongan, keadilan, *teposeliro*, tolong menolong, hormat menghormati, toleransi, keramahtamahan, dan beberapa nilai lainnya adalah megaprojek yang harus dituntaskan oleh Pendidikan Kewarganegaraan. Lebih jauh, pada akhirnya diharapkan dapat membangun jiwa militansi dan nasionalisme generasi penerus bangsa Indonesia (B. Anderson: 1999, 27). Guna mencapai tujuan yang ada, konsep Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat berakselerasi terhadap percepatan perkembangan masalah kekinian yang dihadapi bangsa Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan bukan konsep pendidikan yang kaku dengan idealitas yang melangit dan tidak dapat diubah sama sekali. Idealitas Pendidikan Kewarganegaraan harus menyesuaikan

diri untuk mengurai dan menjawab problem bangsa Indonesia yang terus berkembang.

Hanya saja idealitas harapan sistem Pendidikan Kewarganegaraan seperti di atas, dalam prakteknya masih menyisakan problem bawaan. Artinya, antara harapan dan kenyataan dalam sistem pendidikan kewarganegaraan masih berjauhan dan membutuhkan perbaikan-perbaikan. Beberapa permasalahan dalam sistem Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia saat ini, misalnya; *Pertama*, Pendidikan Kewarganegaraan hanya dijadikan sebagai formalitas belaka. Prakteknya, banyak kalangan civitas akademika yang menganggap dan memberlakukan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi kewajiban saja, terlepas tujuan utamanya sudah tercapai atau belum. Maraknya tindakan anarkhis, seperti tawuran pelajar, dan mudarnya nilai solidaritas sosial di masyarakat saat ini, dapat dijadikan bukti bahwa kinerja Pendidikan Kewarganegaraan belum memberi pemahaman serta memberi pengaruh sikap dan mental kepada pelajar atau mahasiswa.

*Kedua*, Belum terbangunnya sinergisitas dengan pelajaran atau mata kuliah yang lain. Sistem pendidikan kewarganegaraan saat ini juga belum memiliki atau belum membangun sinergisitas dengan pelajaran atau mata kuliah yang lain. Misalnya, munculnya beberapa aksi terorisme dalam dedaerah terahir yang dilatarbelakangi kesalahan interpretasi ajaran agama, serta maraknya praktek koruptif para pejabat publik, maka seharusnya materi Pendidikan Kewarganegaraan harus bersinggungan atau membangun keterpaduan dengan pendidikan agama dan pendidikan lainnya. Interpretasi tekstualitas agama yang salah, berpotensi akan memupuk subur tindakan anarkhis dan anti nasionalisme. Kaitannya dengan hal ini pendidikan agama harus berbicara; bagaimana pendidikan agama tidak hanya berbicara *fikih ubudiyah* saja, akan tetapi juga berbicara masalah fikih sosial, fikih nasionalisme, fikih anti korupsi, dan seterusnya.

Pendidikan kewarganegaraan bukanlah mata kuliah yang kaku dan stagnan, akan tetapi harus terus berakselerasi dengan tuntutan jiwa zaman masyarakatnya. Problem kekinian



masyarakat harus dicarikan langkah solutifnya secara cepat dan tepat menuju sasarannya. Ketika problem yang ada di masyarakat lebih dilatarbelakangi oleh kesalahan interpretasi agama, maka Pendidikan Kewarganegaraan juga harus menyisipkan sub-bahasan interpretasi dan internalisasi nilai agama secara benar berdasar sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kesalahannya bersumber dari kesalahan pembacaan sejarah, maka pendidikan sejarah yang akan meluruskannya, begitu seterusnya. Sehingga, keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan akan jauh dari kesan kaku dan *ahistoris*.

*Ketiga*, Problem guru atau dosen. Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki problem pada sisi pengajar dan dosen pengampunya. Prakteknya, dapat dijumpai pihak sekolah atau kampus menyerahkan Pendidikan Kewarganegaraan kepada pengampu yang tidak memiliki kapasitas dan kapabelitas kaitannya dengan *ghirah* atau semangat kebangsaan. Lebih jauh, justeru terdapat pengajar atau dosen yang mempunyai semangat dekonstruktif dan mengajar secara kontra produktif dari semangat Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri.

Kontra produktifitas guru atau dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan karena berangkat dari latar belakang semangat untuk merobohkan kedaulatan bangsa Indonesia dan berupaya mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang diyakininya.

Merujuk realitas di atas, maka penting untuk membuat langkah mempertegas bangunan Nasionalisme melalui perguruan tinggi. *Ruh* bangunan nasionalisme di perguruan tinggi dapat ditelisik dari paradigma dan sikap para dosennya, khususnya dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Karena transformasi nilai dan penjiwaan nasionalisme diharapkan mendapat kontribusi besar dari Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut (Ernia Duwi Saputri: 2016, 41-50). Dosen yang tidak memahami dan tidak mempunyai jiwa nasionalisme, maka akan sangat sulit untuk menjadikan siswa atau mahasiswanya menjadi nasionalis. Indikator sederhana dalam mengukur dosen yang berjiwa nasionalisme atau tidak, dapat dilihat dari paradigma yang dimiliki berupaya meneguhkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka

Tunggal Ika atau sebaliknya. Bangunan paradigmatis ini dapat ditelusuri dari produk karya tulisnya, sumber referensi yang digunakan, dan cara bersikapnya.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, penulis telah melakukan penelusuran dalam bentuk kerja penelitian. Penelitian ini fokus pada paradigma dosen Pendidikan Kewarganegaraan UNEJ dan IKIP PGRI Jember dalam mempertegas nasionalisme. Setiap dosen yang kami wawancarai, dapat kami sampaikan mempunyai kekayaan perspektif dengan penguatan-penguatan kerangka argumentatifnya. Bangunan perspektif yang dimiliki dengan argumentatifnya, menunjukkan *mindset* atau paradigmanya. Idealitas paradigma dosen Pendidikan Kewarganegaraan maka harus mempertegas untuk melakukan penguatan terhadap pondasi dan pilar-pilar bangsa Indonesia. Jika seorang dosen Pendidikan Kewarganegaraan atau secara umum dosen MKU berorientasi untuk mengganti sistem kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, maka sejatinya dosen tersebut tidak layak menjadi dosen Pendidikan Kewarganegaraan.

Pilihan terhadap para dosen UNEJ karena secara institusional, UNEJ merupakan kampus negeri terbesar di daerah Tapal Kuda Jawa Timur, sementara pilihan terhadap IKIP PGRI Jember sebagai penyeimbang informasi kondisi riil dari kampus swasta. Penelitian ini berjudul; “Menelusuri Paradigma Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mempertegas Nasionalisme”.

### **Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini menitikberatkan pada:

1. Bagaimana paradigma dosen pendidikan kewarganegaraan terkait Nasionalisme?
2. Bagaimana formulasi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang ideal dalam mempertegas nasionalisme menurut dosen Pendidikan Kewarganegaraan?

### **Urgensitas Penelitian**

Urgensitas penelitian ini, karena berangkat dari realitas kebutuhan akan pencarian formula solutif terhadap problem nasionalisme bangsa Indonesia yang saat ini sedang diuji. Beberapa

ancaman nasionalisme ditandai dengan munculnya beberapa gerakan terorisme, gerakan daerah untuk referendum, gerakan ideologi transnasional yang menolak sistem Pancasila, hadirnya MEA, dan beberapa bentuk ancaman nasionalisme lainnya. Tantangan tersebut harus dijawab dan diurai dengan mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini melalui formulasi sistem Pendidikan Kewarganegaraan yang mempertegas nasionalisme itu sendiri. Penelitian ini selain untuk melakukan pemetaan masalah nasionalisme, juga mencari formulasi yang tepat atas kurikulum dan sistem mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan secara utuh di perguruan tinggi. Harapan penelitian berkelanjutannya untuk merekonseptualisasi sistem pendidikan kewarganegaraan yang terstruktur secara berjenjang dan integral dari PAUD hingga perguruan tinggi, sehingga pendidikan kewarganegaraan tidak berjalan secara parsial.

## **METODE PENELITIAN**

Setiap penelitian dilakukan tidak pernah berangkat dari ruang hampa dan bebas nilai. Suatu penelitian pasti diawali

dengan menentukan arah langkah konseptual sebelum menentukan jenis penelitian dan pendekatan yang akan digunakan. Seorang peneliti pasti mengawali dengan mencabar terlebih dahulu maksud dari penelitian yang akan dilakukannya. Karena dalam sebuah penelitian, peneliti pasti akan mengawalnya dengan pertanyaan; apa yang hendak disampaikan melalui penelitian tersebut (Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln 1997: 265). Merujuk fokus dari penelitian yang dijabarkan di depan, maka peneliti dalam penelitian ini akan mencoba mengungkap paradigma dosen Pendidikan Kewarganegaraan dalam mempertegas nasionalisme. Nasionalisme sejatinya dapat dibangun dan diperkuat melalui jalur akademis, khususnya melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Sehingga menjadi penting menelusuri paradigma dosen pendidikan kewarganegaraan untuk melakukan pemetaan dan merekonseptualisasi sistem pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Penelitian lebih lanjutnya (penelitian kelanjutannya), diharapkan menghasilkan daya tawar berupa buku ajar pendidikan kewarganegaraan segmentasi SD sampai

SMA dan modul panduan pembelajaran tematik pendidikan kewarganegaraan di PAUD.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kajian paradigmatis. Pendekatan kajian paradigmatis digunakan sebab untuk mengetahui secara mendalam mengenai cara pandang dosen Pendidikan Kewarganegaraan di kampus UNEJ dan IKIP PGRI Jember dalam mempertegas nasionalisme. Sementara penggunaan metode kualitatif dengan sifat deskriptif di sini, dimaksudkan dalam pelaporan hasil penelitian yang dilakukan peneliti nantinya, bisa membuat gambaran secara sistematis dan akuratif untuk menghasilkan fakta-fakta lapangan yang valid. Fakta-fakta di lapangan tersebut dirangkum untuk menformat ulang sistem pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan menawarkan buku ajar perguruan tinggi. Sifat deskriptif ini juga digunakan untuk bisa menjabarkan interpretasi dari fakta-fakta yang dihasilkan oleh penelitian.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### **Paradigma Dosen Pendidikan Kewarganegaraan UNEJ dan IKIP PGRI Jember Terkait Nasionalisme**

Dosen Pendidikan Kewarganegaraan UNEJ dan IKIP PGRI Jember mempunyai kekayaan perspektif dengan penguatan kerangka argumentatif dalam menyoal urgensitas paradigma mereka. Bangunan perspektif argumentatifnya, menunjukkan *mindset* atau paradigma yang dimiliki. Idealitas paradigma dosen Pendidikan Kewarganegaraan, maka harus mempertegas untuk melakukan penguatan terhadap pondasi dan pilar-pilar bangsa Indonesia. Jika seorang dosen Pendidikan Kewarganegaraan atau dosen MKU berorientasi mengganti sistem kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, maka sejatinya dosen tersebut tidak layak menjadi dosen Pendidikan Kewarganegaraan. Drs. Mahfudz Sidiq, M.M. selaku Koordinator Pusat Pengembangan Pendidikan Karakter dan Ideologi Kebangsaan pada LP3M UNEJ menuturkan:

Jika ada dosen yang kerangka berfikirnya, atau paradigmanya berupaya mengganti sistem bangsa dan negara Indonesia, maka ia tidak pantas jadi dosen di perguruan tinggi, lebih-lebih perguruan tinggi negeri. Pusat Pengembangan Pendidikan Karakter dan Ideologi Kebangsaan UNEJ yang dipasrahi MKU, maka kami berupaya selektif terhadap dosennya, khususnya dosen agama. Karena agama itu dapat dijadikan media atau daya dorong untuk melakukan sesuatu, termasuk kekerasan dan bom bunuh diri. Ketika seseorang didoktrin dengan agama itu akan memiliki semangat yang luar biasa. Jika dosennya punya paham radikal, maka mahasiswanya gimana. Untuk itu, jika terdapat dosen agama di UNEJ yang terindikasi memiliki pemikiran radikal, ingin merubah sistem kenegaraan kita, maka tidak kita pakai lagi. Dapat kami pastikan pendidikan agama UNEJ steril dari dosen yang berpaham demikian, karena kami cukup selektif tadi. Untuk mata kuliah yang lain, kami juga selektif tapi tidak seselektif pendidikan agama.

Bapak Akhmad Munir, S.Th.I., M.A. selaku koordinator mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan juga menuturkan:

Saya dan beberapa teman telah melakukan pemetaan di ruang kelas agar tau lebih dini keberagaman mahasiswa-mahasiswi Universitas Jember. Pemetaan ini ingin mengetahui sejauh mana pemikiran

radikalisme pada mahasiswa UNEJ. Radikalisme akan dibatasi pada pemahaman istilah-istilah teologis dan sekaligus juga pandangan terhadap kepemimpinan dalam konteks negara. Afirmatif terhadap kedua hal tersebut maka dianggap sebagai radikal. *Breakdown* dari kedua hal tersebut adalah afirmasi terhadap pandangan pembentukan kepemimpinan Islam/kekhilafahan Islam; Cita-cita pembentukan negara Islam atau negara khilafah; Mencita-citakan terbentuknya negara Islam atau negara Khilafah; Makna jihad tentang perang suci membela Islam untuk menegakkan agama Allah dan melindungi kegiatan dakwah; Perang (*qital*) yang memang diperintahkan oleh Alqur'an untuk memerangi orang kafir di manapun berada; dan *Murtad* (keluar dari agama Islam) yang perlu dibunuh karena pernah dilakukan oleh Khalifah Pertama, Abu Bakar As Siddiq, kepada umat Islam yang murtad saat itu. Dari hasil penggalan data, berdasarkan pada pembatasan di atas maka diketahui bahwa rata-rata tingkat radikalisme mahasiswa-mahasiswi di Universitas Jember angkanya cukup signifikan dengan sebaran pada masing-masing fakultas.

Kepala LP3M Universitas Jember pada skala makro juga melihat adanya perubahan paradigma Pendidikan Kewarganegaraan, bahwa sejak 2002-2003 terdapat perubahan mendasar. Era reformasi yang berjalan sejak 1998 kemudian diikuti dengan reformasi

kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2002. Pada Tahun 2003 Pendidikan Kewarganegaraan sudah pada posisi mapan karena ditambahkan dengan 2 materi pokok yaitu demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Soal bagaimana mengantisipasi problem-problem ideologis; Bagaimana Pancasila sebagai ideologi bangsa mampu menangkal ideologi-ideologi transnasional, maka titik pijak problem ideologis sebenarnya bukan hanya pada masalah ideologisasi agama saja, namun juga ideologi besar yang lain yang selama ini sudah berjalan. Sebagaimana penuturan Kepala LP3M berikut;

Titik pijak problem ideologis sebenarnya bukan hanya pada masalah ideologisasi agama saja, namun juga ideologi besar yang lain yang selama ini sudah berjalan. Pada skala makro, maka sebenarnya di era orde baru juga mendapat perhatian serius untuk melakukan proses penangkalan. TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 juga bukti bagi perhatian negara terhadap begitu seriusnya ancaman komunisme yang dalam TAP MPRS 25 Tahun 1966 itu disebut Marxisme dan Leninisme. Nah yang lain juga dalam orde baru selalu didengungkan isu-isu opini wacana tentang menyeleksi, membangun sterilisasi ideologi lain diluar bangsa Indonesia. Artinya bahwa sterilisasi sudah jauh dilakukan oleh negara ini. Artinya pula, bahwa penangkalan ideologi-ideologi

transnasional itu sudah jauh dilakukan oleh negara ini.

Bagi kepala LP3M ini, saat ini bangsa Indonesia perlu menempatkan problem ideologi sesuai pada tempatnya. Radikalisme atas nama agama yang berkembang di Indonesia, seolah Islam adalah agama yang radikal. Pada skala Internasional terbangun sentiment seakan Islam pada posisi yang salah (Shaver, Troughton, Sibley, & Bulbulia, 2016). Akhmad Taufik menambahkan;

Saya menolak jika ada orang menyebut agama disebut sebagai ideologi. Agama ya agama, ideologi ya ideologi. Karena ideologi adalah bagian sebuah proses yang mana manusia atas kelompok manusia menandakan sebuah kepentingan melalui instrumen ideologi tertentu. Nah, dalam konteks itu radikalisme lebih tepatnya adalah politisasi ajaran agama, artinya apa; bahwa *agenda politik dilabeli dengan ajaran agama tertentu*.

Berdasar pernyataan Dr. Akhmad Taufik, M.Pd. tersebut, bahwa problem ideologis keagamaan tidak lebih adalah politisasi agama itu sendiri, ada proses pelabelan politik keagamaan untuk meningkatkan nilai jualnya. Karena ada proses pelabelan agama, maka agenda

dosen Pendidikan Kewarganegaraan harus memisahkan antara proses doktrin yang salah itu dengan agenda politik yang ada. Bagaimana cara memisahkan? Maka harus dilihat, jika yang bergerak adalah dunia perguruan tinggi, maka proses pememisahan melalui instrumen pendidikan. Pelabelan agama pada agenda-agenda politik harus dipisahkan dengan beberapa instrumen. Jika problem pelabelan agama terdapat di dunia kampus, maka instrumen solutifnya melalui kurikulum kampus. Akhmad Taufik, mempertegas pendapatnya dengan menawarkan instrumen solusi. Tawaran yang diberikan pada problem pelabelan agama di dunia kampus, solusinya melalui cara pendekatan kurikulum; *pertama* penataan kurikulum, *kedua* harus betul-betul selektif terhadap pengampu mata kuliah, baik mata kuliah umum maupun dosen secara keseluruhan.

Upaya pemantauan kerangka paradigmatis terhadap seluruh dosen, maka semua pihak harus mengambil tanggung jawab. Kurikulum UNEJ sudah menegaskan melalui pedoman kurikulum yang baru Tahun 2017, bahwa salah satu pencapaian pembelajaran adalah profil sikap yang *nasionalis-religius* dan

*religius-nasionalis*. Selain hal itu, juga harus ada upaya selektif terhadap pengampu mata kuliah.

Secara terpisah Bapak Dr. Mohamad Naim, M.Pd dan Bapak Wajihuddin, M.Fil. selaku dosen Pendidikan Kewarganegaraan UNEJ menyampaikan hal yang sama, Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu membangun jiwa nasionalisme mahasiswanya. Pendidikan Kewarganegaraan harus terinternalisasikan pada diri setiap mahasiswa, sehingga diharapkan dapat terhindar dari sikap-sikap yang dapat merusak sendi-sendi kebangsaan. ST Fanatus Syamsiyah. M.Si. dosen IKIP PGRI Jember juga memberikan pandangannya terkait Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Jawaban saya sangat jelas setuju Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Karena Pancasila adalah dasar dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Lima sila Pancasila jika ingin diganti atau dihapus berarti sama dengan ingin membubarkan Negara Kesatuan Indonesia.

Namun Fanatus juga menyampaikan nalar kritisnya bahwa kenyataannya rasa nasionalisme belum terbentuk secara sempurna pada mahasiswa dan masyarakat Indonesia

umumnya. Salah satunya karena proses pembelajaran yang kurang tepat, kekurangtepatan tentunya terkait strategi pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tersebut. Hal yang fatal jika strategi pembelajaran penerapannya banyak yang monoton, menjadikan mahasiswa bosan dalam mengikuti perkuliahan. Adanya guru atau dosen yang malas belajar, akhirnya sering memberikan tugas. Pola yang demikian menjadikan doktrinasi Pendidikan Kewarganegaraan lewat pembelajaran atau perkuliahan menjadi kurang bermakna. Problem Pendidikan Kewarganegaraan juga terlihat dari pelimpahan tugas pelajaran atau mata kuliah pada guru atau dosen yang tidak tepat. Sering terjadi bahwa dosen yang tidak mempunyai *background* akademik Pendidikan Kewarganegaraan, akan tetapi harus menyampaikan materi Pendidikan Kewarganegaraan.

A Zulkarnai Ali, M.Si. dengan diperkuat oleh Yudha Bagus Tunggal Putra, MH yang berprofesi sebagai dosen IKIP PGRI Jember juga menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap upaya mengganti Pancasila dengan system lain. Baginya Pancasila, UUD 1945, NKRI,

dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan harga mati. Pancasila merupakan konsensus filosofis dan politis. Artinya bahwa Pancasila merupakan ideologi yang bisa mengakomodir keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di Indonesia yang itu adalah menjadi kebutuhan bersama. Apapun yang ada dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 itu adalah hal yang final, artinya suatu hal yang tidak bisa dirubah karena merupakan kesepakatan bersama, dan bila ingin mengganti ideologi bangsa Indonesia berarti sama halnya dengan ingin menghancurkan Indonesia.

Terkait radikalisme dalam konteks ke-Indonesian saat ini, Zulkarnain mengaitkan dengan arus globalisasi yang tidak bisa terbendung lagi. Bagi Zulkarnain, perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan pasar bebas akan berpengaruh secara ideologis pula, tidak hanya berpengaruh pada faktor ekonomi saja, namun juga mengarah ke faktor sosial dan agama. Bagaimana Pancasila mampu digunakan sebagai solusi menyelesaikan permasalahan yang ada.



Pendidikan Kewarganegaraan adalah keharusan dan wajib dilaksanakan, diikuti, serta dipelajari oleh mahasiswa terlepas suka atau tidak suka. Tidak hanya di Indonesia, *civic education* juga diwajibkan untuk dilaksanakan di setiap negara; contohnya negara Amerika yang mengharuskan warga negaranya mengikuti bela negara dan mengikuti *civic education* dengan tujuan dijadikan benteng untuk bagaimana menjadi warga negara yang baik, mengerti akan hak dan kewajiban. Bapak J Agung Indratmoko memperkuat beberapa pendapat dosen yang lain dengan menyampaikan pentingnya nasionalisme. Bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, erat sekali dengan daya sokong nasionalisme (Alfaqi, 2015). Persoalan nasionalisme dan patriotisme di era globalisasi bukan hanya masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saja. Hal tersebut juga dialami negara Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya dengan kekuatan politik, ekonomi, budaya, dan hankam yang kuat. Saat ini Amerika juga sedang berupaya keras dalam membangun semangat nasionalisme bangsanya. Memperhatikan

kenyataan di atas masalah membangun jiwa nasionalisme dan patriotisme saat ini tengah menghadapi tantangan yang berat, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk kembali mengangkat menjadi tema nasional. Dalam dunia pendidikan, perlunya peran bersama yang nyata sebagai bentuk penanaman dan mempertegas nasionalisme dan patriotisme dalam diri siswa-siswi. Banyak tema yang bisa digunakan sebagai materi motivasi contohnya, berkaitan dengan kemampuan filterisasi terhadap kebudayaan barat yang hari ini tidak hanya diakses melalui televisi, namun secara cepat langsung bisa diakses melalui telepon seluler yang hari ini.

Nova Eko Hidayanto selaku dosen PPKn IKIP PGRI Jember, menyampaikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan harus kita upayakan menjadi pembelajaran yang aplikatif, bukan sekedar teori belaka. Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan mulai sejak duduk dibangku sekolah dasar (SD) sampai dengan perguruan tinggi, harapannya agar membentuk karakter yang baik, bermoral, berjiwa kebangsaan, patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air Indonesia pada masing-masing diri

individu yang hidup dan lahir di bumi Nusantara tercinta.

Merujuk uraian di atas, upaya men-*scanning* paradigma dosen Pendidikan Kewarganegaraan UNEJ dan IKIP PGRI Jember terdapat kesamaan pola. Bahwa kerangka paradigmatik dosen Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan hal yang sangat substantif. Karena dosen Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai tugas untuk mentransformasikan keilmuan dan nilai-nilai yang berorientasi untuk meneguhkan jiwa nasionalisme. Proses transformasi keilmuan dan nilai-nilai kewarganegaraan akan menjadi bias, jika para dosen pembina mata kuliahnya tidak mempunyai kerangka paradigma mempertegas urgensi nasionalisme. Proses transformasi keilmuan dan nilai-nilai kewarganegaraan, membutuhkan penjiwaan dan penguasaan strategi pembelajaran. Manakala ada dosen pembina mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, akan tetapi baru semangat mengajarnya justru memperkuat paradigma anti-nasionalisme yang tentunya juga anti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, maka hal ini menjadi masalah tersendiri.

Pendidikan Kewarganegaraan akhirnya akan menjadi mata kuliah yang tidak jelas arah dan tujuannya.

Dosen dari kedua kampus tersebut berdasar hasil wawancara, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa semuanya sepakat nasionalisme merupakan orientasi yang substantif pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tidak ada satu dosen UNEJ maupun IKIP PGRI Jember yang menolak pentingnya Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hanya saja terdapat beberapa dosen yang memberikan penekanan akan ketidaksepatannya terkait Pancasila dikatakan sebagai bagian 4 pilar Indonesia dan disejajarkan dengan UUD 1945 dan yang lainnya. Karena Pancasila sebagai pondasi bangsa yang menjwai kehidupan kebangsaan Indonesia. Pondasi dalam konstruksi bangunan sangat berbeda dengan pilar atau tiang. Pancasila merupakan ideologi bangsa, falsafah bangsa, etika bangsa dan *a basic norm* atau *staatsfundamentalnorm* yang tidak bisa disamakan dengan yang lainnya.

Berdasar penelusuran karya ilmiah yang memfokuskan pada substansi tulisan, kerangka paradigma yang

dibangun, referensi acuan yang digunakan, maka secara subyektifitas peneliti dapat menarik satu konklusi bahwa paradigma dosen Pendidikan Kewarganegaraan UNEJ dan IKIP PGRI Jember tidak membahayakan bagi mahasiswa dan kelangsungan harmonitas dan dinamisitas bangsa Indonesia. Hanya saja temuan ini bisa mentah, jika tampilan kerangka berfikir akademisnya para dosen Pendidikan Kewarganegaraan dalam publikasi ilmiah berbeda dengan kerangka berfikir ideologis yang sebnarnya dan sengaja disembunyikan.

### **Formulasi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Yang Ideal Dalam Mempertegas Nasionalisme**

Formulasi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dapat dikatakan ideal, jika mampu beraksesari dengan percepatan perubahan dan tuntutan zamannya. Perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan pasar bebas telah membawa implikasi positif dan negatif secara besar. Pasar bebas nyatanya tidak hanya membawa implikasi kebebasan pasar pada komoditi konsutif belaka, akan tetapi juga nilai-nilai budaya

yang belum tentu bersesuaian deng *local wisdom* Indonesia.

Gerakan-gerakan radikalisasi agama dengan aksi bom bunuh diri, narkoba, kenalakalan remaja, praktik koruptif, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya harus segera dijawab oleh Pendidikan Kewarganegaraan. Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan jangan sampai menjadi pembahasan idealitas teoritis yang melangit dengan meninggalkan realitasnya. Kepala LP3M UNEJ, Bapak Dr. Akhmad Taufik, M.Pd. memberikan tawaran solutif atas problematika kebangsaan, khususnya menyangkut problem paradigmatic yang ada di dunia kampus. Tawaran yang diberikan pada problem tersebut, solusinya melalui cara pendekatan kurikulum; *pertama* penataan kurikulum, *kedua* harus betul-betul selektif terhadap dosen pengampu mata kuliah, baik dosen mata kuliah umum dan seluruh seluruh dosen pada umumnya.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengkonstruksi jiwa nasionalisme harus diberikan melalui proses pembelajaran yang tepat. Pentingnya jiwa nasionalisme tidak sekedar dijadikan pengetahuan, akan tetapi harus benar-

benar dijiwai atau diinternalisasikan pada masing-masing mahasiswa. Dra. Yayuk Mardiati, MA. dosen Pendidikan Kewarganegaraan UNEJ pada acara FGD menyampaikan, Pendidikan Kewarga negaraan bukan sekedar pengetahuan, akan tetapi harus aplikatif dalam turut serta menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dan bangsa Indonesia. Mahasiswa harus diajari dan praktik membuat proyek menyelesaikan masalah masyarakat. Ketika mereka berbicara kemiskinan, mereka tidak sekedar beropini akan tetapi benar-benar mengetahui dan mungkin merasakan apa yang dirasa oleh masyarakat miskin melalui proyeknya.

Pemikiran yang sama juga disampaikan oleh A Zulkanain Ali dan Nova Eko Hidayanto yang menyampaikan bahwa problem kebangsaan itu bagaikan fenomena gunung es di lautan, permukaannya terlihat kecil atau sedikit akan tetapi realitasnya sangat besar. Pendidikan Kewarganegaraan tentunya harus menyoal permasalahan secara komprehensif, tidak sekedar dijadikan pengetahuan saja. Untuk itu, Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu

membaca dinamika kekinian baik nasional maupun dinamika Internasional.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini telah berupaya menelusuri paradigma dosen Pendidikan Kewarganegaraan dalam mempertegas Nasionalisme. Penelusuran paradigmatik dilakukan melalui wawancara dan telaah publikasi karya ilmiah dosen Pendidikan Kewarganegaraan. Hasil penelitian dianalisis dan dilakukan pembahasan yang melahirkan kesimpulan antara lain:

1. Kerangka paradigmatik dosen Pendidikan Kewarganegaraan UNEJ dan IKIP PGRI Jember dikaitkan dengan Nasionalisme berada posisi yang menguatkan. Artinya tidak ditemukan adanya dosen Pendidikan Kewarganegaraan pada kedua kampus tersebut yang berorientasi untuk merobohkan bangunan kebangsaan Indonesia. Semua dosen Pendidikan Kewarganegaraan sepakat dan mendukung Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan pilihan yang tepat dan final.

2. Perlu adanya formulasi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang ideal dalam mempertegas Nasionalisme. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kurikulum dengan tawaran; *pertama*, penataan kurikulum, *kedua*, harus betul-betul selektif terhadap dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tersebut. Pendidikan Kewarganegaraan jangan sampai hanya dijadikan sebagai pengetahuan dengan idealitas teori belaka, akan tetapi Pendidikan Kewarganegaraan harus dijadikan mata kuliah yang aplikatif dalam menyelesaikan problem kebangsaan kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. 2011. *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Adzkiyak. 2015. *Reaktualisasi Pancasila, Menyoal Identitas, Globalisasi, dan Diskursus Negara Bangsa*. Artikel dipublikasikan dalam jurnal berjudul “Refleksi atas Praktik Ideologi; Diskursus Relasi Nation-State dalam Konteks Pancasila”. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Anderson, B. 1999. *Komunitas-komunitas Imajiner: Renungan tentang Asal Usul dan Penyebaran Nasionalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggraini, L. 2010. *Membangun Komitmen dalam Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan Kewarganegaraan Melalui Pengembangan Sketsa Mewarganegaraan Multi Dimensional*. Bandung: Lab Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Bauer, O.(2003). *What Is a Nation? dalam Nationalism in Europe 1815 to Present*. London: Routledge. Bogdan, Robert, & Knopp Biklen. 1972. *Qualitative Observation in Organization Settings*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Budimansyah, D. 2009. *Pembelajaran Pembudayaan Nilai Pancasila*. Bandung: Genesindo.
- F, Hertz. 1971. *Nationality in History and Politics, A Study of the Psychology and Sociology of National Sentiment and Nationalism*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Kohn, H. 1965. *Nationalism Its Meaning and History*. Florida: Robert E. Krieger Publishing
- Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. KBBI (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Riff, A.M. 1995. *Dictionary of Modern Political Ideologies*. Manchester University Press
- Saputri, Ernia Duwi. 2016. *Peran Dosen Dalam Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan IKIP PGRI Bojonegoro; Media Prestasi Vol. XVII No.1*.
- Shaver, J.H., Troughton, G., Sibley, C.G., & Bulbulia, J.A. 2016. *Religion and The Unmaking of Prejudice Toward Muslims: Evidence From A Large National Sample*. *PLoS ONE*, 11(3), 1-26. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0150209>

- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penulis Pendidikan Anti Korupsi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud Dikti Bagian Hukum Kepegawaian.
- Winata Putra, Udin S. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Dirjen Dikti).